

ANALISA KEUANGAN DAERAH DAN PENGANGGURAN DALAM MEMPENGARUHI KINERJA EKONOMI DI PROVINSI BANTEN

Shofwatun Hasna^a, Dewiana Novitasari^b

^aSTIE Insan Pembangunan, Kabupaten Tangerang, Indonesia. Email: shofwatunh@gmail.com

^bSTIE Insan Pembangunan, Kabupaten Tangerang, Indonesia. Email: Novitasoeprapto76@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze regional finances and unemployment in affecting the short-term economic performance in Banten province period 2011-2014. The estimation technique used is panel data analysis with random effect. The result of analysis shows that Banten regional finance can be categorized well. The good criteria is evidenced by the percentage of Fiscal Autonomy Degrees (DOF) and the Routine Capability Index (IKR), which is above 40%. This means that the Banten Provincial Revenue is categorized as able to finance its own regional activities and routine expenditures. While the regression results from the model panel built shows that, significantly spending per capita and the budget has a positive impact, and unemployment has a negative impact on short-term economic performance. Indonesian socioeconomic data shows that the unemployment rate in Banten is still very high. It will affect the level of income of its community. This will also have an impact on the low purchasing power of the people which will reduce the level of regional expenditure per capita. As an industrial area with a fairly good financial condition, Banten should be able to be even greater in reducing unemployment and poverty, increasing economic growth and the HDI of its population.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa keuangan daerah dan pengangguran dalam mempengaruhi kinerja ekonomi jangka pendek di provinsi Banten periode 2011-2014. Teknik estimasi yang digunakan adalah analisis data panel dengan random effect. Hasil analisis menunjukkan bahwa keuangan daerah Banten dapat dikategorikan baik. Kriteria baik dibuktikan dari persentase Derajat Otonomi Fiskal (DOF) dan Indeks Kemampuan Rutin (IKR) yang nilainya di atas 40%. Hal ini berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah Banten dikategorikan mampu membiayai sendiri kegiatan daerah dan belanja rutinnya. Sedangkan hasil regresi dari model panel yang dibangun menunjukkan bahwa, secara signifikan pengeluaran perkapita serta APBD berdampak positif, dan pengangguran berdampak negatif terhadap kinerja ekonomi jangka pendek. Data sosial ekonomi Indonesia menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Banten masih sangat tinggi. Padahal terbukti bahwa tingkat pengangguran berhubungan negatif dengan kinerja ekonomi. Jika Banten tinggi tingkat penganggurannya, maka akan mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakatnya. Hal ini juga pasti akan berdampak pada daya beli masyarakat yang rendah yang akan menurunkan tingkat pengeluaran perkapita daerah. Banten sebagai kawasan industri dengan kondisi keuangan yang cukup baik, seharusnya mampu lebih besar lagi dalam menekan pengangguran dan kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan IPM penduduknya.

KATA KUNCI: Keuangan Daerah, Pengangguran, Kinerja Ekonomi

1. Pendahuluan

Akuntansi keuangan berfungsi sebagai alat ukur di instansi pemerintah sebagai acuan dalam menentukan kebijakan ekonomi pada suatu daerah. Data laporan keuangan daerah di setiap periode pasti akan banyak dibutuhkan oleh banyak kalangan terutama kalangan akademisi guna mengevaluasi kinerja ekonomi daerah pada suatu periode tertentu. Laporan keuangan daerah meliputi laporan realisasi anggaran belanja daerah, neraca serta laporan arus kas yang akan

memberikan gambaran penting untuk para pemangku kepentingan dalam mengevaluasi dan melihat seberapa besar kinerja daerah yang sudah tercapai. Keuangan daerah yang baik, pasti akan mampu membiayai kebutuhan belanja daerah sehingga menghasilkan kinerja ekonomi yang baik pula.

Pengelolaan keuangan daerah mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua undang-undang di bidang otonomi daerah tersebut berdampak pada dilaksanakannya pelimpahan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah. Implementasi otonomi daerah dalam hal pengelolaan keuangan adalah sebagai format kebijakan yang diharapkan mampu memecahkan problema keuangan pemerintah pusat, dikarenakan sebelum era otonomi daerah, pemerintah pusat menguasai pendapatan daerah sehingga daerah sangat tergantung pada alokasi bantuan dari pusat. Sumber-sumber keuangan tersebut beserta dengan anggaran yang akan dibelanjakan dituangkan dalam rencana keuangan daerah yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan penunjang dalam pembangunan daerah. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah salah satunya ditentukan oleh kinerja keuangan daerah yang memadai.

Indonesia sedang mengalami perubahan dari perekonomian yang didominasi sektor pertanian berbasis desa, menuju perekonomian dengan pangsa kegiatan yang lebih besar di sektor industri dan jasa di perkotaan. Tren ini mendorong terjadinya urbanisasi secara pesat. Data BPS tahun 2016-2017 menunjukkan bahwa sektor penyumbang pendapatan terbesar di Indonesia adalah sektor industri. Indonesia telah memilih industrialisasi sebagai sebuah strategi pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Cepatnya proses industrialisasi di Indonesia mendorong terjadinya peralihan lahan dari pertanian ke industri.

Sesuai dengan UU no 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, bahwa industrialisasi diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut (Biro APBN), (1) Sumbangan sektor industri terhadap PDB, (2) Tenaga kerja yang terserap, (3) Sumbangan komoditi industri terhadap ekspor barang dan jasa. Perindustrian bagi Indonesia merupakan kontributor tertinggi terhadap PDB yaitu sebesar 23,37%, namun sektor ini hanya mampu menyerap tenaga kerja sebesar 14,88% yang merupakan peringkat terendah dalam penyerapan tenaga kerja dibandingkan dengan sektor pertanian 38,07% dan perdagangan 23,74%.

Banten adalah salah satu kawasan industri di Indonesia dengan PDRB mayoritas berasal dari sektor industri pengolahan yaitu sebesar 49,75%. Namun jika dilihat dari kemampuan sektor industri dalam menyerap tenaga kerja masih tergolong rendah hanya 23,11%, meskipun sektor industri tetap menjadi sektor penyerap tenaga kerja terbesar di Banten (wikipedia, 2018).

Tabel 1.1 Data Jumlah Industri Besar dan Sedang di Banten

Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kab Pandeglang	17	20	13	12	12	11	13
Kab Lebak	13	11	17	16	17	18	20
Kab Tangerang	782	750	704	689	682	675	782
Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kab Serang	162	144	143	144	144	152	148
Kota Tangerang	670	610	583	563	555	561	559
Kota Cilegon	69	72	76	77	77	77	81
Kota Serang	14	15	23	23	21	19	22
Kota Tangerang Selatan	77	73	61	59	62	57	57
Provinsi Banten	1804	1695	1620	1583	1570	1570	1682

Data jumlah industri tersebut diatas menandakan terdapat ribuan industri tersebar di seluruh wilayah Banten, yang terbanyak terdapat di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Serang.

Selain itu, ada yang unik dari Banten dimana data BPS (2017) menyebutkan bahwa tingkat pengangguran terbuka tertinggi berdasarkan provinsi tahun 2016 adalah Banten yaitu sebesar 8,92% sedangkan rata-rata pengangguran tiap provinsi menunjukkan angka sebesar 5,61%. Angka pengangguran di Banten sejak tahun 2016 hingga 2018 tercatat lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka pengangguran nasional (Rifa'i, 2018). Padahal, Banten adalah sebuah kawasan industri yang terintegrasi dengan infrastruktur yang cukup memadai, dimana terdapat Bandara Soekarno Hatta, Pelabuhan Merak, Jalan Bebas Hambatan Jakarta-Merak, dan lain sebagainya.

Konsumsi rumah tangga yang tinggi serta investasi yang kuat merupakan faktor penting yang mendukung kinerja perekonomian daerah. Oleh karena itu, efektifitas kinerja ekonomi daerah selain dilihat dari anggaran keuangan daerah, juga sangat dipengaruhi oleh faktor pengeluaran perkapita/rata-rata konsumsi rumah tangga. Tinggi rendahnya pengeluaran perkapita juga dapat ditentukan oleh faktor pengangguran. Pengangguran yang tinggi di Banten dapat mempengaruhi daya beli dan konsumsi masyarakat. Masyarakat yang menganggur berarti tidak memiliki pendapatan. Hal ini juga pasti berpengaruh pada konsumsi masyarakat secara agregat.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisa; (1) keuangan daerah Banten; (2) pengaruh pengeluaran perkapita, pengangguran dan APBD terhadap kinerja ekonomi daerah Banten.

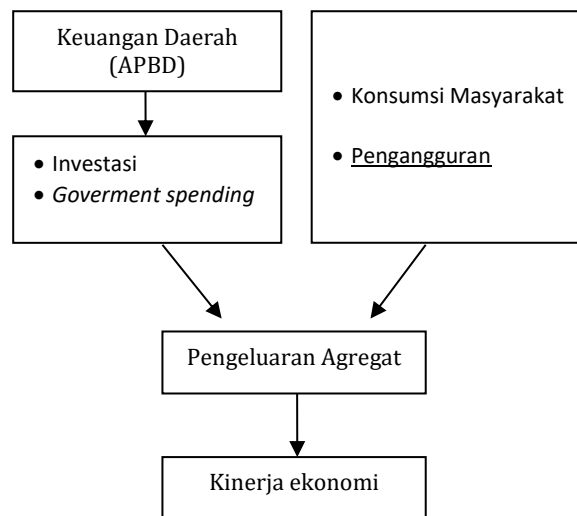
2. Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

Pada pembangunan ekonomi, ada tiga indikator makro yang dijadikan sebagai ukuran kemajuan pembangunan. Indikator tersebut adalah tingkat pertumbuhan (*growth rate*), tingkat penciptaan kesempatan kerja (*Employment*) dan kestabilan harga (*Price Stability*), (Mankiw, 2002). Dengan demikian, setiap daerah akan melakukan berbagai kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan perdagangan untuk mendorong pertumbuhan yang direncanakan, menciptakan lapangan kerja dan

menjaga kestabilan harga. Pada tahun 2008, konsumsi rumah tangga masih menjadi komponen terbesar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Rukayah (2017) telah melakukan analisis keuangan pada salah satu kabupaten di wilayah Banten yaitu kabupaten Serang (ibukota provinsi Banten), yang memberikan hasil bahwa penanaman modal periode 2014 sampai 2016 tergolong sangat efektif, ini berarti pemerintah kabupaten Serang telah berhasil dalam merealisasikan anggaran belanja daerahnya. Sedangkan menurut Rudiyanto ketika meneliti seluruh wilayah di provinsi Banten, kemampuan keuangan daerah per kabupaten/kota dilihat dari rasio DOF (Derajat Otonomi Fiskal) dan IKR (Indeks Kemampuan Rutin) tergolong cukup/sedang.

Penulis dalam hal ini ingin menganalisa keuangan daerah Banten dan pengangguran dalam mempengaruhi kinerja ekonomi jangka pendek di Banten. Keuangan daerah tertuang dalam APBD yang digunakan untuk membiayai kegiatan daerah dan belanja rutinnya melalui *government spending*. Penelitian ini mengangkat variabel investasi, *government spending*, dan konsumsi masyarakat sebagai komponen pengeluaran agregat yang mampu mempengaruhi kinerja ekonomi jangka pendek di Banten. Investasi dan *government spending* dilihat dari realisasi APBD, sedangkan konsumsi masyarakat dilihat dari pengeluaran perkapita dan tingkat pengangguran untuk periode 2011-2014. Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah,



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

2.1 Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (APBD dalam Rudiyanto, 2015).

Pengelolaan keuangan daerah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (PP 58/2005, pasal 1 dalam Rudiyanto, 2015:27). Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber dana ekonomi yang dikelola oleh pemerintah (pusat atau daerah) yang

menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Manfaat informasi realisasi anggaran yaitu menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, realisasi belanja, realisasi transfer, surplus/defisit dan realisasi pembiayaan dari satu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan (Rukayah 2017:4),

- 1) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- 2) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Keuangan daerah dapat diukur dari rasio Derajat Otonomi Fiskal (DOF), dan Indeks Kemampuan Rutin (IKR), (Reksohadiprojodalam Rudiyanto, 2015). DOF adalah suatu perhitungan yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah. Sedangkan IKR adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana kemampuan PAD suatu daerah membiayai belanja rutinnya. DOF dan IKR diukur dengan

$$\text{DOF} = (\text{Pendapatan Asli Daerah} / \text{Total Pendapatan Daerah}) \times 100\%$$

$$\text{IKR} = (\text{Pendapatan Asli Daerah} / \text{Total Belanja Rutin}) \times 100\%$$

dengan kriteria sebagai berikut,

Baik	; jika lebih dari 40%
Sedang	; jika 20-30%
Kurang	; jika 10-20%
Sangat kurang	; jika 0-10%

Halim (2007) berpendapat bahwa untuk mengukur kinerja keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, akuntabilitas, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan dan hasil dari rasio tersebut dapat digunakan untuk: (1) menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, (2) mengukur efisiensi dan efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah, (3) mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, (4) melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Putri (2010) menyimpulkan bahwa kinerja keuangan yang cukup bagus pada suatu daerah tetap tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan dalam belanja-belanja yang tidak perlu dilakukan, maka kedepannya pemerintah daerah harus bisa mengefektifkan belanja daerahnya agar tercapai *good governance*.

2.2 Tingkat Pengeluaran Agregat

Pengeluaran atau pembelanjaan agregat adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam suatu periode tertentu, dan biasa diukur untuk suatu tahun tertentu. Semakin besar perbelanjaan agregat yang dilakukan dalam perekonomian semakin tinggi tingkat

ekonomi dan kesempatan kerja yang dicapai. (Wahyuningsih, 2017). Pengeluaran agregat meliputi lima jenis pengeluaran, berikut ini adalah lima komponen pengeluaran agregat: Konsumsi Rumah Tangga (C), Investasi perusahaan (I), Belanja pemerintah (G), Ekspor (X), dan Impor (M).

2.2.1 Teori Konsumsi John Maynard Keynes

Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional (*pendapatan disposabel*) perekonomian tersebut. Fungsi konsumsi dapat dinyatakan dalam persamaan:

$$C = a + bY \dots\dots\dots (1.1)$$

Pendapatan merupakan determinan konsumsi yang penting. Keynes menduga bahwa, kecenderungan mengkonsumsi marginal (*marginal propensity to consume*) jumlah yang dikonsumsi dalam setiap tambahan pendapatan adalah antara nol dan satu (Rahardja, 2008:258),

$$C = a + bY, \text{ dimana } a > 0, 0 < b < 1 \dots\dots\dots (1.2)$$

Keterangan:

C = tingkat konsumsi

Y = pendapatan disposibel (tingkat pendapatan nasional).

a = *otonomous consumption* (yaitu konsumsi rumah tangga ketika pendapatan nasional adalah 0).

b = kecenderungan mengkonsumsi marginal.

2.2.2 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Sukirno (1996) mengemukakan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan nilai pembelajaran yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli berbagai jenis kebutuhannya dalam satu tahun tertentu. Dumairy (1999) menyebutkan bahwa pola konsumsi masyarakat dapat digolongkan ke dalam kelompok-kelompok penggunaan, yaitu pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Keputusan konsumsi rumah tangga dipengaruhi keseluruhan perilaku baik jangka panjang maupun jangka pendek. Keputusan konsumsi rumah tangga untuk jangka panjang penting peranannya dalam pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk jangka pendek penting peranannya dalam menentukan permintaan agregat (Sukirno, 1994).

Banyak alasan yang menyebabkan analisis makroekonomi perlu memperhatikan konsumsi rumah tangga secara mendalam. Alasan pertama, konsumsi rumah tangga memberikan pemasukan kepada pendapatan nasional. Pengeluaran konsumsi rumah tangga sekitar 60.75% dari pendapatan nasional. Alasan

kedua, konsumsi rumah tangga mempunyai dampak dalam menentukan fluktuasi ekonomi dari satu waktu ke waktu lainnya (Brilliant, 2008).

Nanga (2001) mengemukakan bahwa faktor-faktor pengeluaran konsumsi adalah pendapatan, selera, faktor sosial kultur, kekayaan, hutang pemerintah, *capital gain*, tingkat suku bunga, tingkat harga, *money illusion*, distribusi umur, letak geografis, dan distribusi pendapatan.

2.2.3 Pengeluaran Pemerintah

Belanja pemerintah meliputi pengeluaran untuk barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah. Belanja pemerintah mencakup upah pegawai negeri dan pengeluaran untuk pekerjaan umum (Mankiw 2013:12). Ani (2010) mengemukakan bahwa dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik, pemerintah menetapkan kebijakan fiskal dengan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. Komponen PAD dalam BPS (2014) terdiri dari, (1) pajak daerah, (2) retribusi daerah, (3) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Besar kecilnya PAD yang dapat diterima oleh suatu kota sangat ditentukan oleh dua hal yaitu potensi penerimaan dan tarif pajak yang ditetapkan dengan peraturan daerah setempat. Selain itu, besar kecilnya PAD juga sangat ditentukan oleh perkembangan kegiatan perekonomian daerah bersangkutan. Daerah perkotaan akan mempunyai potensi penerimaan PAD yang lebih besar dibanding kabupaten, karena jumlah hotel dan restoran, bangunan, kendaraan bermotor serta BUMD yang relatif lebih banyak di perkotaan, (Sjafrizal, 2012:274-275).

2.4 Pengangguran

Tingkat pengangguran adalah persentase angkatan kerja yang tidak atau belum mendapat pekerjaan (Rahardja, 2008:376). Satu aspek dalam kinerja ekonomi adalah seberapa efektif suatu perekonomian menggunakan sumber daya dengan baik, karena menjaga para pekerja tetap bekerja menjadi puncak perhatian para pembuat kebijakan, (Mankiw, 2007:34).

Pengangguran di daerah dipengaruhi oleh migrasi. Orang yang menganggur lebih tertarik untuk berpindah/bermigrasi daripada orang yang sudah bekerja. Karena ketika bermigrasi, orang yang menganggur lebih optimis dibanding orang yang sudah bekerja. Maka jika suatu daerah tingkat penganggurannya meningkat lebih tinggi dibanding daerah lainnya, maka tingkat migrasi di daerah tersebut harus diturunkan (Creedy, 1974).

2.5 Kinerja Ekonomi

Kinerja Ekonomi diartikan sebagai gambaran bagus tidaknya perekonomian suatu daerah. Variabel-variabel yang dapat memperlihatkan adalah variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan

gini ratio, (Irdhania, 2009:35). Kinerja ekonomi daerah dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan variabel PDRB. PDRB memuat data informasi tentang kondisi riil suatu daerah pada saat tertentu yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan di suatu wilayah.

Sadono Sukirno (2008:17) juga menjelaskan bahwa, ada beberapa jenis data perekonomian yang dapat dijadikan sebagai alat untuk menilai kinerja ekonomi nasional, (1) pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, (2) tingkat pengangguran, (3) tingkat inflasi, (4) kedudukan neraca perdagangan dan neraca pembayaran, (5) kestabilan nilai uang domestic.

Kinerja pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu wilayah secara makro pada umumnya dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB. Persamaan PDRB adalah sebagai berikut (Setiono, 2011:175),

$$Y = C + I + G + (X-M) \dots\dots\dots (2.1)$$

Dimana,

Y : Produk domestik bruto wilayah

C : konsumsi masyarakat

I : investasi

G : belanja pemerintah

X-M : nilai hasil perdagangan bersih antar wilayah

Persamaan diatas memperlihatkan bahwa nilai total produk bruto wilayah berbanding lurus dengan C, I, G, dan X-M. Komponen konsumsi (C) dapat meningkat akibat adanya kiriman dana reguler dari penduduk wilayah tersebut yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Sedangkan nilai investasi (I) tidak selalu bergantung kepada tabungan lokal, tetapi juga meningkat dengan adanya penanaman modal asing. Sementara itu, belanja pemerintah (G) pada umumnya merupakan input dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penelitian Gwartney, Lawson dan Holcombe tahun 2001 (dalam Ali, 2014), menyebutkan bahwa pemerintah mempunyai fungsi sebagai *core function*. Fungsi ini dapat membuat peningkatan dalam efisiensi perekonomian dan seterusnya dapat meningkatkan pertumbuhan. Ada dua kategori dalam fungsi ini, yaitu; fungsi sebagai pelindung (*protective function*) dan fungsi sebagai penyedia barang-barang publik (*provision of a limited set of collective goods*). *Protective function* termasuk di dalamnya penegakan peraturan dan hukum dan hak-hak individu yang dapat melindungi masyarakat dari kehilangan hak-haknya. Fungsi yang kedua yaitu *provision of a limited set of collective goods*, adalah menyediakan barang-barang atau jasa seperti pertahanan, jalan, pendidikan dan layanan masyarakat lainnya serta barang-barang yang tidak disediakan atau disediakan dalam jumlah yang sedikit sekali oleh sektor swasta.

Pembangunan Regional saat ini harusnya berorientasi komunitas. Mila Reforma (dalam Koirudin, 2005:142) mengemukakan bahwa pembangunan regional berorientasi komunitas menghasilkan proyek-proyek pembangunan yang berorientasi pada, (1) pemenuhan kebutuhan nyata masyarakat yang bersangkutan (*community oriented*), (2) sumber daya yang ada di masyarakat yang bersangkutan (*community based*), (3) partisipasi aktif para anggota masyarakat yang bersangkutan (*community managed*).

Berlandaskan kajian teori tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah,

H1 *diduga pengeluaran perkapita dan APBD berdampak positif terhadap kinerja ekonomi jangka pendek di Provinsi Banten*

H2 *diduga pengangguran berdampak negatif terhadap kinerja ekonomi jangka pendek di Provinsi Banten.*

3. Metodologi Penelitian

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data BPS diambil dari buku Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/kota dan buku Keuangan Kabupaten/kota. Data sekunder yang digunakan adalah data panel, yaitu penggabungan dari data *cross section* sebanyak 8 kabupaten/kota di Banten dan data *time series* dari tahun 2010-2014. Data sekunder yang diperoleh dari data statistik dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data panel. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan software *Eviews6* agar proses pengolahan data lebih cepat dan akurat.

3.1 Panel Data Analysis

Ariefanto (2012: 150) menjelaskan bahwa terdapat dua tipe pemodelan data panel yaitu *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Pemodelan ini berdasarkan asumsi apakah karakter residual bersifat konstan atau random.

3.1.1 Fixed Effect Model

$$y_{it} = \alpha_0 + \sum_{j=1}^k \alpha_j X_{j,it} + u_{it} \quad \dots\dots\dots (2.1)$$

dimana

$$u_{it} = e + \sum_{i=1}^N D_i^c v_i + \sum_{t=1}^{T-1} D_t^r w_t \quad \dots\dots\dots (2.2)$$

D_i^c dan D_t^r adalah variabel *dummy* sebanyak N-1 dan T-1 untuk mengidentifikasi residual spesifik *cross section* dan urutan waktu yang bersifat konstan. Dengan memasukkan (2.2) ke (2.1) maka diperoleh

$$y_{it} = \alpha_0 + \sum \alpha_j X_{j,it} + \sum_{i=1}^{N-1} D_i^c v_i + \sum_{t=1}^{T-1} D_t^r w_t + e \quad \dots\dots\dots (2.3)$$

3.1.2 Random Effect Model

$$y_{it} = \beta_0 + \beta_1 x_{it1} + \dots + \beta_k x_{itk} + a_i + u_{it} \quad \dots\dots\dots (3.1)$$

Model *random effect* dalam Ariefanto (2012:151-152), digunakan ketika *unobserved effect* α_i dapat diasumsikan tidak berkorelasi dengan satu/lebih variabel bebas. Model (3.1) dapat dimodelkan dengan menggunakan *composite error term*,

$$y_{it} = \beta_0 + \beta_1 x_{it1} + \dots + \beta_k x_{itk} + v_{it} \dots \dots \dots (3.2)$$

Karena α_i selalu ada pada *composite error term* pada setiap periode waktu, maka v_{it} mengalami *serial correlation*. Dapat ditunjukkan bahwa:

$$Corr(v_{it}, v_{is}) = \frac{\sigma_\alpha^2}{\sigma_\alpha^2 + \sigma_u^2}; t \neq s \dots \dots \dots (3.3)$$

Kemudian mengoreksi keberadaan serial correlation dengan prosedur GLS. Namun demikian agar prosedur ini efektif data harus memiliki N yang lebih besar daripada T. Dengan GLS dilakukan transformasi pada setiap regressor dan variabel terikat melalui suatu koefisien λ , dimana

$$\lambda = 1 - \left(\frac{\sigma_u^2}{\sigma_\alpha^2 + T\sigma_u^2} \right)^{1/2} \dots \dots \dots (3.4)$$

Estimator ini selanjutnya digunakan untuk mentransformasi persamaan 3.1 menjadi

$$y_{it} - \hat{\lambda}y_i = \beta_0(1 - \hat{\lambda}) + \beta_1(x_{it1} - \hat{\lambda}x_{i1}) + \dots + \dots \dots \dots (3.5)$$

$$\beta_k(x_{itk} - \lambda x_{ik}) + (v_{it} - \lambda \bar{v}_i)$$

3.2 Pemilihan Model Terbaik

Juanda (2012:183) menjelaskan bahwa pemilihan model antara pooled atau panel adalah dengan Uji Chow atau *Likelihood Test Ratio*, yaitu dengan melihat signifikansi dari F hitung. Uji Chow melihat konsistensi pendugaan dengan *fixed effect* untuk memilih antara *fixed effect* atau *pooled*.

H_0 : *Probability value* > α (*pooled* lebih baik)

H_1 : *Probability value* < α (*fixed effect* lebih baik).

Sedangkan untuk pemilihan model panel antara *fixed effect* atau *random effect* pada penelitian ini didasarkan pada Uji Hausman (Juanda, 2012). Hipotesis yang diuji adalah,

H_0 : *random effect*

H_1 : *fixed effect*

Uji Hausman memperhatikan nilai *p-value* dari statistic uji *chi-sq*. Tolak H_0 jika *p-value* dari *chi-sq* lebih kecil dari α .

3.3 Model Penelitian

Berdasarkan uraian sebelumnya bahwa kinerja ekonomi dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB riil, dimana persamaan PDRB adalah $Y = C + I + G + (E-M)$, maka penelitian ini memodifikasi persamaan tersebut kedalam bentuk yang lebih sederhana $Y = C + I + G$, yakni hanya mengangkat faktor konsumsi masyarakat (C), investasi dan *government spending* (I + G). Konsumsi masyarakat diambil dari pengeluaran perkapita, sedangkan investasi dan *government spending* diambil dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, dalam penelitian ini juga memasukkan variabel pengangguran sebagai bagian dari daya beli masyarakat yang ikut mewakili tingkat konsumsi masyarakat. Sehingga rancangan model yang dibangun dalam penelitian ini adalah,

$$PDRB_{it} = \beta_0 + \beta_1 \log_Pengeluaran\ perkapita_{it} - \beta_2 Pengangguran_{it} + \beta_3 APBD_{it} + \epsilon_{it}$$

dimana,

- PDRB_i : PDRB masing-masing kabupaten/kota yang mewakili variabel kinerja ekonomi
 Perkapita_i : pengeluaran perkapita dalam juta rupiah yang mewakili tingkat konsumsi masyarakat
 Pengangguran_i : Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
 APBD_i : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah mewakili investasi dan kemampuan konsumsi pemerintah
 ε : *error term*

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Analisis

4.1.1 Hasil Uji Chow

Langkah pertama dalam pemilihan model terbaik adalah dengan Uji Chow yaitu melihat konsistensi pendugaan dengan *fixed effect* untuk memilih antara *fixed effect* atau *pooled*. Hasil uji *Chow* menunjukkan bahwa penggunaan model *fixed effect* untuk ketiga model lebih tepat, karena *probability value* dari F statistic signifikan. Perhatikan tabel 1.1.

Tabel 1.2 Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1285,6351	(7,21)	0,0000
Cross-section Chi-	194,007	7	0,0000

Sedangkan untuk pemilihan model panel antara *fixed effect* atau *random effect* adalah dengan uji Hausman. Uji Hausman memperlihatkan bahwa nilai *p-value* dari statistic uji *chi-sq* (0,1698) lebih besar dari α (0,10) sehingga menerima H₀ yang artinya *random effect* lebih baik daripada *fixed effect*.

Tabel 1.3 Hasil uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	5.027064	3	0.1698

4.1.2 Uji Hipotesa dan Signifikansi Model Panel Random Effect

Hasil estimasi model ditampilkan dalam tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.4 Hasil Estimasi Model *Fixed Effect*

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	-6.968241	-2.602535	*0.0146
PERKAPITA?	3.303426	4.760819	*0.0001
PENGANGGURAN?	-0.071165	-2.827044	*0.0086
APBD?	0.132753	5.449979	*0.0000

Keterangan: (*) signifikan pada $\alpha = 0.05$

Hasil estimasi *random effect* model penelitian ini menunjukkan bahwa variabel perkapita dan APBD secara simultan berdampak positif pada variabel PDRB, sedangkan pengangguran berdampak negatif. Hasil *t-statistic* menjelaskan bahwa secara parsial setiap variabel di tiap daerah kabupaten/kota memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap kinerja ekonomi daerahnya dibanding dengan pengaruh tiap variabel terhadap kinerja ekonomi tingkat provinsi.

Hasil estimasi *random effect* memiliki R^2 yang memadai yaitu 0,87 yang berarti bahwa model ini mampu menjelaskan variabel endogen sebesar 87%, sedangkan 13% dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Sehingga, setelah melihat hasil estimasi maka model penelitian dapat ditulis sebagai berikut:

$$\text{Log_PDRB}_{it} = -6,9 + 3,3 \log_ \text{Pengeluaran perkapita}_{it} - 0,071 \text{ Pengangguran}_{it} + 0,13 \text{ APBD}_{it} + \varepsilon_{it}$$

4.2 Analisa Keuangan Daerah Banten

Keuangan daerah Banten dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio Derajat Otonomi Fiskal (DOF), dan Indeks Kemampuan Rutin (IKR). Hasil dari DOF menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah Banten dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerahnya tergolong dalam kriteria baik. Hal ini ditunjukkan dari hasil penghitungan DOF sebagai berikut,

$$\text{DOF} = (\text{Pendapatan Asli Daerah} / \text{Total Pendapatan Daerah}) \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{DOF}_{2011} &= (2.895.569.550.000 / 3.755.614.330.000) \times 100\% = 75\% \\ \text{DOF}_{2012} &= (3.395.883.040.000 / 5.413.705.180.000) \times 100\% = 61\% \\ \text{DOF}_{2013} &= (4.118.551.720.000 / 6.230.229.810.000) \times 100\% = 66\% \\ \text{DOF}_{2014} &= (4.899.125.740.000 / 7.068.432.910.000) \times 100\% = 68\% \end{aligned}$$

Sedangkan hasil IKR menunjukkan bahwa kemampuan PAD suatu daerah dalam membiayai belanja rutinnya tergolong dalam kriteria baik. Hal ini ditunjukkan dari hasil penghitungan IKR sebagai berikut,

$$\text{IKR} = (\text{Pendapatan Asli Daerah} / \text{Total Belanja Rutin}) \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{IKR}_{2011} &= (2.895.569.550.000 / 3.901.218.110.000) \times 100\% = 74,22\% \\ \text{IKR}_{2012} &= (3.395.883.040.000 / 5.317.735.490.000) \times 100\% = 62\% \\ \text{IKR}_{2013} &= (4.118.551.720.000 / 5.295.139.150.000) \times 100\% = 78,8\% \\ \text{IKR}_{2014} &= (4.899.125.740.000 / 6.192.155.570.000) \times 100\% = 78,7\% \end{aligned}$$

Baik DOF maupun IKR menunjukkan hasil yang sama, nilai keduanya dikategorikan baik. Nilai DOF dan IKR Banten sempat menurun di tahun 2012 dan kembali naik di tahun 2013. Keuangan yang baik di Banten ini menggambarkan kemampuan *government spending* yang besar dalam membiaya pembangunan daerah Banten. Jika realisasi *government spending* besar dan tepat sasaran, maka pemerintah Banten pasti mampu mewujudkan kinerja ekonomi yang baik pula.

Pengeluaran pemerintah secara garis besar terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran konsumsi pemerintah tercakup dalam pengeluaran rutin dan pengeluaran investasi pemerintah tercakup dalam pengeluaran pembangunan. Pengeluaran investasi pemerintah dapat memainkan

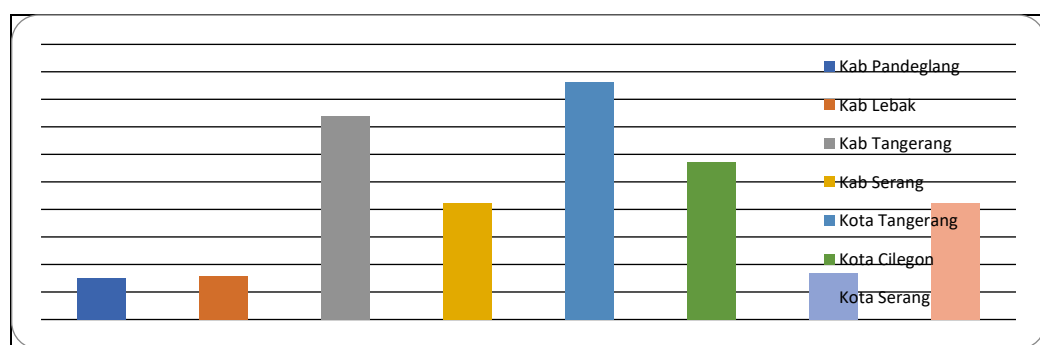
peran sebagai salah satu penggerak utama (*prime mover*) dalam perekonomian, sehingga ketika perekonomian sedang mengalami kelesuan akibat adanya resesi ekonomi yang memerosotkan kemampuan masyarakat dalam melakukan kegiatan perekonomian, pemerintah melalui instrumen kebijakan yang dimiliki dapat tampil menyelamatkan keadaan dengan memperbesar pengeluaran pemerintah melalui anggaran belanja defisit, dan sebaliknya.

Jika dianalisis dari realisasi pendapatan dan belanja per tahun menunjukkan bahwa di tahun 2011 keuangan Banten mengalami defisit (belanja daerah lebih besar daripada pendapatannya), kemudian berturut-turut surplus dari tahun 2012 hingga 2014. Namun, realisasi belanja pemerintah Banten tahun 2013 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, dan kembali meningkat di tahun 2014, yang dapat dilihat dari tabel berikut;

Tabel 1.5 Realisasi Pendapatan dan Belanja Banten

Tahun	Total Pendapatan Daerah	Total Belanja Daerah	Ket.
2011	3.755.614.330.000	3.901.218.110.000	Defisit
2012	5.413.705.180.000	5.317.735.490.000	Surplus
2013	6.230.229.810.000	5.295.139.150.000	Surplus
2014	7.068.432.910.000	6.192.155.570.000	Surplus

Tahun 2014 pemerintah Banten menganggarkan belanja daerah yang meningkat tajam dari tahun 2013. Surplus pada tahun 2014 juga tampak lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Jika dikaitkan dengan kondisi di tahun 2016 menurut data provinsi, dimana pengangguran di Banten adalah yang terbesar di Indonesia, ini mengindikasikan bahwa belanja daerah Banten yang sudah cukup besar ini belum mampu mewujudkan kinerja ekonomi yang baik. Hal ini disebabkan oleh pembangunan yang kurang merata pada seluruh kabupaten/kota yang ada. Pembangunan masih berpusat di daerah industri seperti Kota Cilegon, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang. Sedangkan daerah lainnya yang jauh dari kawasan industri seperti Kabupaten Lebak dan Pandeglang masih jauh tertinggal, yang terlihat dari data PDRB tahun 2014 sebagai berikut;



Gambar 1.2 PDRB Konstan Tahun 2014

Sumber: BPS, data diolah

Fungsi pemerintah sebagai penyedia barang publik dan infrastruktur dapat meningkatkan kinerja ekonomi daerah jangka panjang. Kondisi keuangan yang cukup baik di Banten perlu dialokasikan untuk pembelaan pada sektor-sektor produktif,

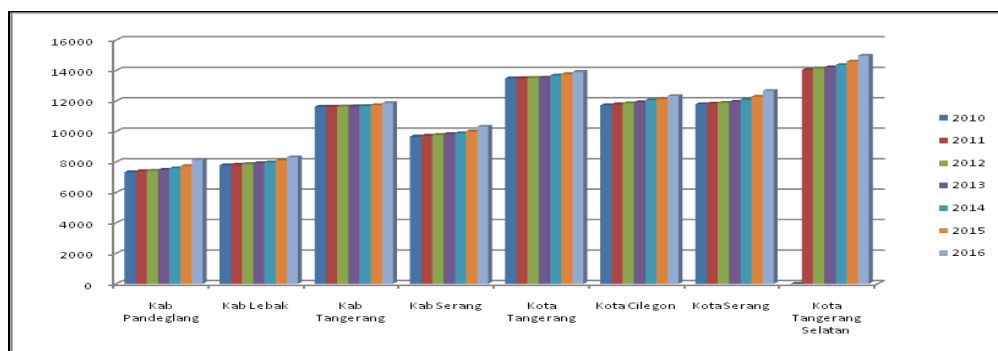
seperti menyediakan barang-barang dan jasa pertahanan, pembangunan infrastruktur jalan, bendungan, stasiun, sekolah, rumah sakit, dan layanan publik lainnya. Pembangunan sektor produktif tersebut diharapkan mampu meningkatkan tabungan daerah, investasi dan pertumbuhan daerah jangka panjang. Pemerintah Banten harus tepat sasaran dalam mengalokasikan dana pembangunannya dimana distribusi dananya ke setiap wilayah perlu disesuaikan dengan tingkat keuangan pada masing-masing kabupaten/kota yang ada. Kabupaten/kota yang memiliki tingkat keuangan yang rendah, akan mendapat transfer pemerintah daerah yang lebih tinggi dari kabupaten/kota maju, begitupula sebaliknya. Pemerintah daerah diharapkan mampu mewujudkan pembangunan yang merata, sehingga ketimpangan perekonomian antar kabupaten/kota dapat teratasi.

4.3 Pengaruh Pengeluaran Perkapita, Pengangguran dan APBD terhadap Kinerja Ekonomi Daerah Banten

Terjadinya kenaikan pada investasi, konsumsi masyarakat dan *government spending* akan menyebabkan kenaikan produksi barang dan jasa. Kenaikan produksi barang dan jasa akan menyebabkan peningkatan terhadap PDRB. Pada jangka pendek, PDRB yang meningkat akan menyebabkan peningkatan pada kinerja ekonomi. Begitu pula sebaliknya, jika terjadi penurunan pada investasi, konsumsi masyarakat dan *government spending* maka akan menyebabkan penurunan produksi barang dan jasa. Penurunan produksi barang dan jasa menyebabkan penurunan PDRB. Pada jangka pendek, PDRB yang menurun dapat menyebabkan penurunan kinerja ekonomi

Pengeluaran perkapita terbukti berdampak positif terhadap kinerja ekonomi daerah Banten. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mankiw (2003; 424) yang mengungkapkan bahwa keputusan konsumsi sangat penting untuk analisis jangka pendek karena peranannya dalam menentukan permintaan output agregat. Konsumsi adalah dua pertiga dari GDP, sehingga fluktuasi dalam ekonomi adalah elemen yang penting dari *booming* dan *resesi*.

Data BPS Provinsi Banten menunjukkan bahwa nilai pengeluaran perkapita di 8 wilayah cukup timpang. Rata-rata pengeluaran perkapita terendah adalah Kabupaten Lebak dan Pandeglang, dan tertinggi adalah Kota Tangerang Selatan.

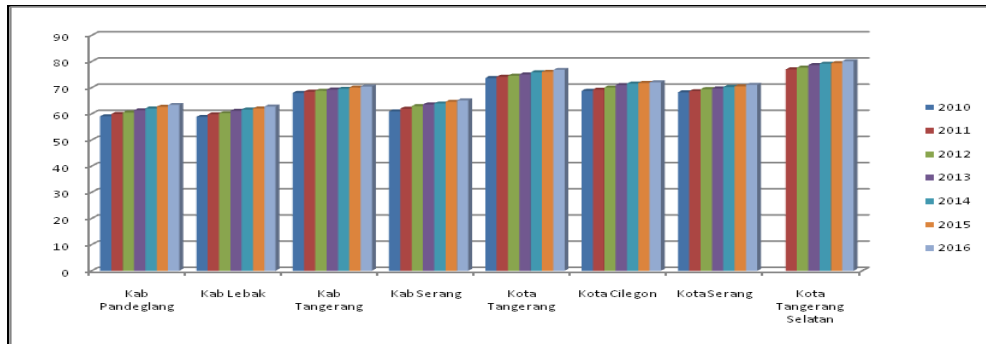


Gambar 1.3 Pengeluaran Perkapita Per Kabupaten/Kota di Banten

Sumber: BPS, data diolah

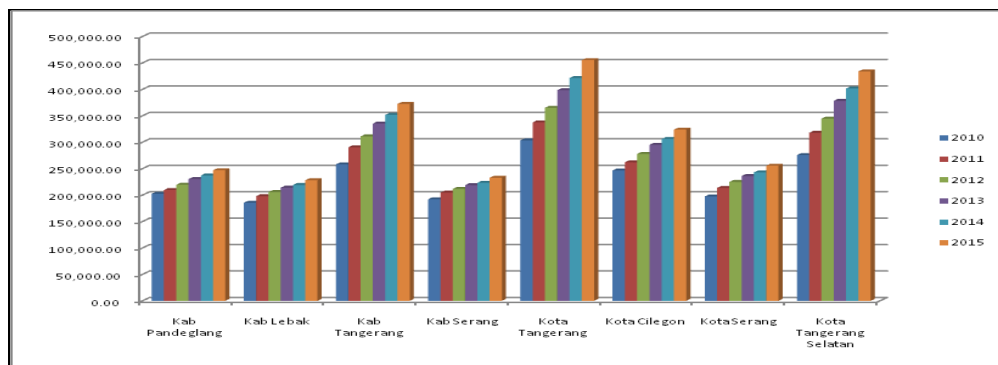
Pengeluaran perkapita yang rendah di Lebak dan Pandeglang ini sesuai dengan hasil data yang menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pandeglang

memang cukup rendah dibanding dengan wilayah yang lain, dan IPM terendah adalah kabupaten Lebak.



Gambar 1.4 Indeks Pembangunan Manusia per Kabupaten/Kota di Banten
Sumber: BPS, data diolah

Namun jika dilihat dari tingkat kemiskinannya, data tingkat kemiskinan di Kabupaten Lebak dan Pandeglang masih cukup rendah diantara semua wilayah yang ada di Banten. Tingkat kemiskinan yang rendah di kedua daerah tersebut, disebabkan oleh kepadatan penduduknya yang memang paling rendah dari tahun 2005 hingga 2015 (BPS, 2015).



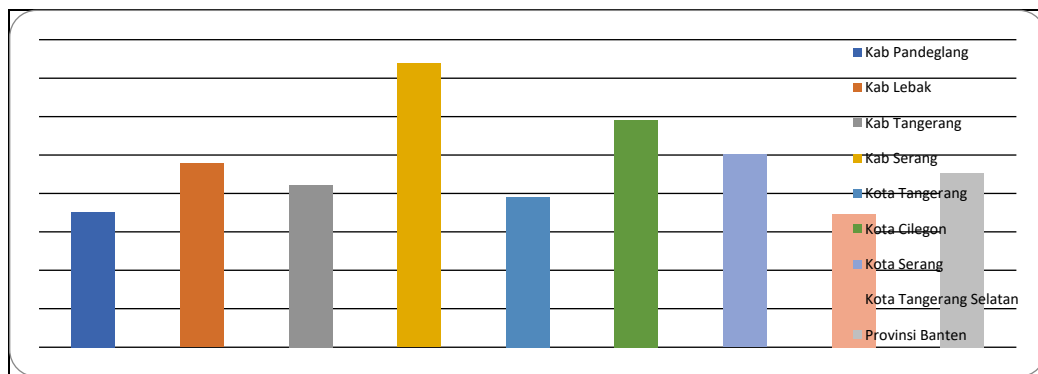
Gambar 1.5 Data Kemiskinan per Kabupaten/Kota di Banten
Sumber: BPS, data diolah

Jika dilihat dari persentase penduduk miskin Banten dibandingkan dengan seluruh provinsi yang ada di Indonesia tahun 2016, persentasenya sebesar 5,36% dibawah nilai rata-rata provinsi 10,70%. Hal ini menunjukkan bahwa Banten sudah cukup baik dalam menekan kemiskinan. Namun jika melihat IPM Banten, nilainya 70,27 dimana masih mendekati nilai rata-rata IPM provinsi sebesar 69,55. Begitu pula dengan pertumbuhan ekonomi Banten tahun 2016, nilainya 5,26 yang juga mendekati nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi sebesar 5,02.

Persentase kemiskinan di Banten sudah cukup rendah dibawah rata-rata persentase kemiskinan menurut provinsi di Indonesia. Sama halnya dengan nilai IPM dan pertumbuhan ekonomi di Banten yang masih menduduki nilai diatas rata-rata meski tidak jauh dari nilai rata-rata itu sendiri. Sebagai kawasan industri, seharusnya Banten mampu lebih besar lagi dalam menekan kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan IPM penduduknya. Apalagi didukung oleh infrastruktur Banten yang cukup memadai dimana terdapat Bandara Soekarno Hatta, Pelabuhan

Merak, Jalan Bebas Hambatan Jakarta-Merak, dan lain sebagainya. Ironisnya, data sosial ekonomi Indonesia menunjukkan bahwa Banten menduduki Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang paling tinggi di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa tingkat pengangguran berhubungan dengan tingkat pengeluaran agregat. Jika dalam suatu daerah tinggi tingkat penganggurannya, maka akan mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakatnya. Hal ini juga pasti akan berdampak pada daya beli masyarakat yang rendah. Rendahnya daya beli masyarakat, menurunkan tingkat pengeluaran perkapita daerah.

Masyarakat yang menganggur tidak memiliki kesempatan untuk menabung. Tabungan merupakan komponen dari investasi, sehingga pengangguran akan menurunkan investasi. Selain itu, pengangguran juga menurunkan jumlah transaksi ekonomi, yang mengakibatkan turunnya pajak pendapatan dan pajak dari transaksi ekonomi. Padahal salah satu penerimaan daerah terbesar adalah dari pajak. Pengangguran juga menyebabkan masyarakat kehilangan pengalaman dan penurunan keterampilan yang dimilikinya. Semakin lama menganggur, akan semakin besar persentase kehilangan pengalaman dan keterampilan tersebut. Hal ini, akan menciptakan peningkatan beban ekonomi masyarakat, kenaikan stress dan depresi, kriminalitas, kerusakan serta demonstrasi.

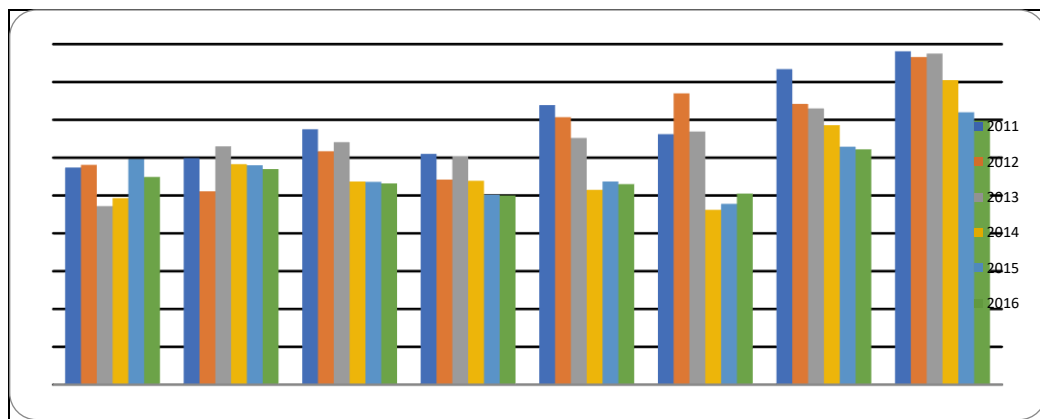


Gambar 1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka per Kabupaten/Kota Tahun 2014
Sumber: BPS, data diolah

Pengangguran tertinggi tahun 2014 yaitu Kabupaten Serang dan Kota Cilegon dimana keduanya adalah daerah kawasan industri. Kesempatan kerja di bidang industri yang ada di Banten masih tergolong minim. Mayoritas perusahaan manufaktur di Banten telah berpindah haluan dari padat karya ke padat modal. Tenaga kerja untuk industri di Banten tidak banyak meyerap sumber daya manusia yang ada. Sehingga pembangunan industri yang sangat memadai di Banten ternyata belum mampu menyediakan peluang pekerjaan yang luas dan kurang memberikan *multiplier effect* untuk masyarakat lokal. Gubernur Wahidin Halim menyebutkan bahwa sesuai data BPS Banten tingkat pengangguran terbuka Banten tercatat sebesar 9,28 persen atau setara dengan 520 ribu orang. Padahal perusahaan di Banten jumlahnya mencapai 15.945. Kontribusi SMK sebanyak 150 ribu lulusan tidak mendapat pekerjaan (Supriyono, 2018).

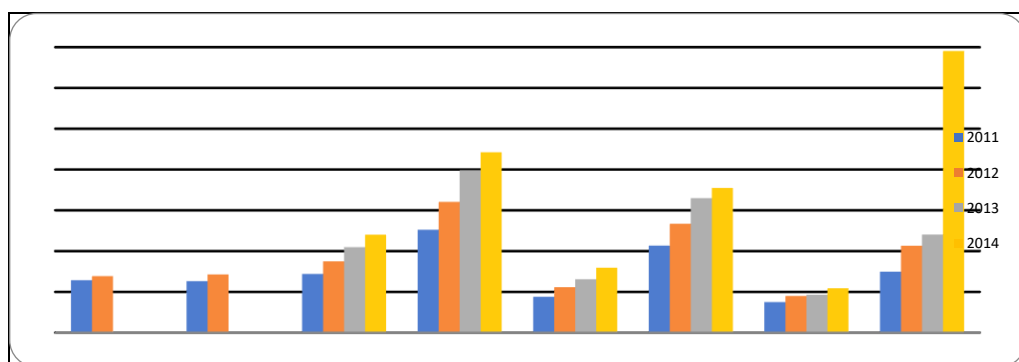
Selain itu, kawasan industri yang melekat pada Banten menjadikan Banten sebagai salah satu daerah yang dibanjiri oleh banyak pendatang dari banyak daerah. Data BPS menunjukkan bahwa kepadatan penduduk Banten ada di peringkat ke 3 setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat sejak tahun 2002 (BPS, 2017). Sampai tahun 2000 nilai rata-rata persentase penduduk kota sebesar 42%. Hal ini menunjukkan urban

bias, yang merujuk pada kecenderungan sekelompok orang untuk ada di perkotaan, yang terdiri dari tenaga kerja, pelajar, pelayan masyarakat dan pabrik yang berusaha menekan pemerintah untuk melindunginya, (Kuncoro, 2010:175). Tingginya pengangguran di Banten dapat disebabkan oleh tingginya kepadatan penduduk yang datang dari kelompok tenaga kerja dari provinsi lain. Kesempatan kerja yang ada banyak diambil oleh kelompok tenaga kerja luar provinsi Banten, sehingga masyarakat lokal banyak yang tidak mendapat pekerjaan. Pendatang telah banyak menggeser kesempatan kerja penduduk Banten setempat yang kurang berkualitas. Hal tersebut bisa diamati dari tingkat pengangguran di kawasan non industri, seperti Kabupaten Lebak yang masih cukup tinggi tingkat penganggurannya padahal kepadatan penduduknya paling rendah dari tahun 2005 hingga 2015 (BPS, 2017). Disini tampak bahwa kabupaten Lebak banyak dihuni oleh para penduduk setempat yang kurang terserap sektor industri dan kalah saing dengan kualitas pendatang luar daerah Banten. Tingginya tingkat pengangguran di Lebak juga menyebabkan rendahnya pengeluaran perkapita di daerah tersebut. Hal ini berpengaruh pada kinerja ekonomi Lebak yang masih cukup rendah pula, yaitu dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi per kabupaten/kota berikut ini,



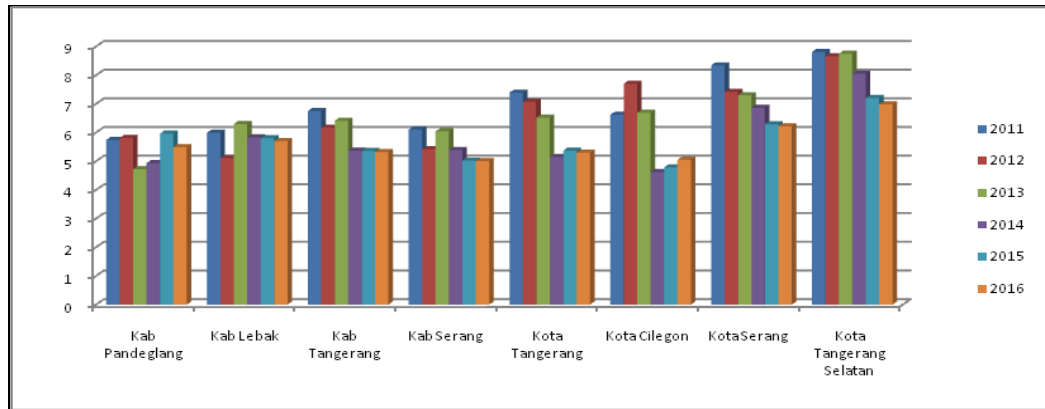
Gambar 1.7 Laju Pertumbuhan per Kabupaten/Kota di Banten
Sumber BPS, data diolah.

Jika dilihat dari tingkat anggaran pendapatan belanja daerah per kabupaten/kota periode 2011-2014, APBD terendah juga diduduki oleh Kabupaten Lebak. yang dapat dilihat pada gambar berikut ini,



Gambar 1.8 APBD per Kabupaten/Kota di Banten
Sumber: BPS, data diolah

Gambar diatas menunjukkan bahwa tahun 2013 hingga 2014 nilai APBD Lebak sangat rendah dibanding daerah lainnya, begitu pula dengan Kabupaten Pandeglang (ditahun yang sama). Rendahnya APBD di Lebak dan Pandeglang ini menunjukkan masih rendah pula kinerja ekonomi jangka pendek keduanya.



Gambar 1.9 Data PDRB riil per Kabupaten/Kota di Banten
Sumber: BPS, data diolah

Data PDRB riil diatas dapat dijadikan instrument untuk mengukur kinerja ekonomi. Pengaruh positif APBD terhadap kinerja ekonomi terlihat dari kedua gambar. Pada tahun 2013, APBD rendah di Pandeglang memperlihatkan kinerja ekonominya yang rendah pula, sebaliknya APBD yang tinggi di Kota Tangerang Selatan menunjukkan kinerja ekonominya yang tinggi pula.

Pembangunan regional Banten saat ini harusnya berorientasi komunitas yang diharapkan mampu menghasilkan proyek-proyek pembangunan yang berciri sebagai (1) pemenuhan kebutuhan nyata masyarakat yang bersangkutan (*community oriented*), (2) berorientasi pada sumber daya yang ada (*community based*), dan (3) berorientasi pada partisipasi aktif para anggota masyarakat lokal (*community managed*). Jika diperhatikan dari 3 hal tersebut, Banten kurang optimal dalam menggunakan APBD secara tepat sasaran sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat lokal. Pengangguran yang tinggi juga mengindikasikan bahwa Banten kurang memprioritaskan masyarakat lokal untuk terserap secara maksimal di sektor industri maupun sektor lainnya, sehingga masyarakat lokal kurang terlibat dalam pembangunan daerah.

Kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran di Banten bisa dengan cara memindahkan pekerjaan/pabrik ke daerah ekonomi rendah/daerah yang rendah pengangguran. Hal ini akan memicu para pengangguran (di daerah ekonomi tinggi/pengangguran tinggi) untuk bermigrasi ke daerah rendah pengangguran mengikuti berpindahnya pabrik tersebut. Christopher (1990) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa, sebenarnya mekanisme pasar bisa mengatasi sendiri ketimpangan ekonomi yang terjadi di suatu daerah, namun membutuhkan waktu yang cukup lama. Sehingga bila mengikuti mekanisme pasar, sumber daya yang tidak termanfaatkan dengan baik di daerah yang tinggi penganggurannya akan memakan biaya yang cukup mahal karena lamanya waktu tersebut. Christopher berpendapat bahwa memindahkan pekerjaan ke daerah yang rendah pengangguran adalah kebijakan yang paling baik karena ini akan diikuti oleh migrasinya para pengangguran di daerah tinggi pengangguran. Sesuai dengan pendapat Creedy

(1974) bahwa orang yang menganggur lebih optimis untuk berpindah/bermigrasi daripada orang yang sudah bekerja.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat dijabarkan kesimpulan bahwa, keuangan daerah Banten dapat dikategorikan baik. Kriteria baik dibuktikan dari persentase DOF dan IKR yang nilainya di atas 40%. Hal ini berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah Banten dikategorikan mampu membiayai sendiri kegiatan daerah dan membiayai belanja rutinnya.

Hasil regresi dari model panel yang dibangun, menunjukkan bahwa pengeluaran perkapita dan APBD berdampak positif terhadap kinerja ekonomi jangka pendek, sedangkan pengangguran berdampak negatif. Tingginya Pengangguran di Banten mengindikasikan bahwa kinerja ekonomi Banten jangka pendek masih tergolong rendah di periode 2011 hingga 2014, terbukti dari hasil regresi tingkat pengangguran terhadap PDRB Banten berpengaruh negatif secara signifikan.

6. Implikasi dan Keterbatasan

Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi kalangan akademis tentang analisa keuangan daerah dan pengangguran dalam mempengaruhi kinerja ekonomi jangka pendek Provinsi Banten Tahun 2011-2014. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu peneliti hanya mengangkat investasi, konsumsi pemerintah dan konsumsi masyarakat saja sebagai komponen pengeluaran agregat yang berdampak terhadap kinerja ekonomi Banten. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan memperluas pembahasan, karena sebagaimana diketahui bahwa ada komponen pengeluaran agregat lain yang berdampak pada kinerja ekonomi, terutama pada perekonomian terbuka seperti ekspor impor, tingkat suku bunga dunia dan kurs mata uang asing.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Novia Hadji dkk. 2014. *Pengaruh Pengeluaran Konsumsi dan Investasi Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado*. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id> pada 8 Februari 2018.
- BPS. 2014. *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2013-2014*. Jakarta: BPS.
- BPS. Diakses dari <https://banten.bps.go.id/dynamictable/2015/09/07> pada 28 Desember 2017.
- BPS. 2017. *Data Sosial Ekonomi Strategis*. Jakarta, BPS.
- Biro ABPN. *Industri Manufaktur Indonesia (Tantangan dan Kebijakannya)*. Diakses dari www.biro-apbn-apbn-Industri-Manufaktur-Indonesia-Tantangan-dan-Kebijakannya-1433474357-1.pdf pada 2016.
- Brilliant Vanda Kusuma. 2008. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Masyarakat Indonesia (Tahun 1988-2005)*.
- Christopher. 1990. *Regional Migration, Wages and Employment: Empirical Evidence and Implications for Policy*. Oxford Economic Paper 42 (1990), 812-831.

- Creedy, J. 1974. *Inter-Regional Mobility: A Cross Section Analysis*. Scottish Journal of Political Economy, 21, 41-53.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hendry. *Intercept/Konstanta Negatif, Bagaimana?*. Diakses dari <https://www.google.co.id/amp/s/teorionline.wordpress.com/2014/06/24/konstanta-intercept-negatif-bagaimana/amp/> pada 28 Desember 2017.
- ILO. 2015. *Tren Ketenagakerjaan dan Sosial di Indonesia 2014-2015 (Memperkuat Daya Saing dan Produktivitas melalui Pekerjaan Layak)*. Indonesia, International Labour Organization.
- Irdhania, Annisa. 2009. *Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Perekonomian dan Potensi Keuangan Kabupaten Bogor*. Laporan hasil penelitian.
- Koirudin. 2005. *Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia (Format Masa Depan Ekonomi menurut Kemandirian Daerah)*. Malang, Averroes Press.
- Kuncoro, Mudrajat. 2010. *Masalah, Kebijakan dan Politik (Ekonomi Pembangunan)*. Jakarta, Erlangga.
- Mankiw, N Gregory. 2007. *Makroekonomi* (Edisi Keenam). Ciracas Jakarta, Erlangga.
- Mankiw, N Gregory. 2003. *Teori Makro Ekonomi Edisi ke Lima*. Jakarta, Erlangga.
- Mankiw, N Gregory. 2013. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta, Salemba Empat.
- Nanga, Muara. (2001). *Makro Ekonomi : Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Edisi Kedua. Jakarta, Rajawali Pers.
- Putri, Shintya Dewi Adi. 2010. *Analisis Kinerja Keuangan pada Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Semarang, Volume 1, Nomor 2, Maret: 139-150.
- Rifa'i, Bahtiar. 2018. *Pengangguran di Banten Peringkat ke 2 Terbesar Nasional*. Diakses dari <https://m.detik.com/news/berita> pada tanggal 6 Juli 2018.
- Rahardja, Pratama. Mandala Manurung. 2008. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Jakarta, FEUI.
- Rukayah, dkk. *Analisis Laporan Realisasi Anggaran dengan Menggunakan Rasio Efektifitas dan Rasio Efisiensi pada Kantor Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang*. Jurnal Akuntansi Vol. 4 no 2 Juli 2017.
- Rudiyanto, Muhamad. *Analisis Kinerja Keuangan serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. 2015. UNDIP, Semarang.
- Sjafrizal. 2012. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. 2008. *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukirno, Sadono, 1996, *Pengantar Teori Makroekonomi*. Edisi Kedua. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono, 1994, *Teori Pengantar Makro Ekonomi*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Supriyono. 2018. *Banyak Industri di Banten tapi Serapan Tenaga Kerja Minim*. Diakses dari <https://www.radarbanten.co.id/banyak-industri> pada tanggal 6 Juli 2018.
- Setiyo, Dedi NS. 2011. *Ekonomi Pengembangan Wilayah*. Jakarta: FE-UI.
- Wahyuningsih, Dini. *Pengeluaran Agregat*. Diakses dari <https://wahyuningsihdini17.wordpress.com> pada 30 Desember 2017.
- Wikipedia. *Ekonomi dan Kependudukan Banten*. Diakses dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Banten> pada 16 Januari 2018.
- Susenas. 2012. *Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia per Provinsi*. Jakarta, BPS.